

PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nur Qhofifah
qhofifahifah@gmail.com
Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research determines the effect of Good Government Governance and government internal control systems on local government performance. The study applies quantitatively. Furthermore, the data were primary taken from questionnaires. The questionnaires were distributed to 15 Surabaya Regional Apparatus Organization (OPD), with the Head of the Finance Sub-division and the staff as informants. Good Government Governance was measured by four indicators, namely transparency, accountability, participation, and law compliance. Meanwhile, government internal control systems were measured by indicators from the Committee of Sponsoring Organizations (COSO), i.e. control environment, risk measurement, SOP implementation, procedure checking, and observing. Moreover, the data analysis technique used statistics descriptive analysis, data quality test, classical assumption test, and multiple linear regression. The result indicates that Good Government Governance and government internal control systems have a positive impact on local government performance. It means that the implementation of Good Government Governance principles and internal control systems that are effective and better can facilitate the local government's performance optimally in building the development and public service supply.

Keywords: good government governance, government internal control systems, and local government performance.

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan data yang digunakan adalah data primer sebagai sumber data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner pada 15 organisasi perangkat daerah Kota Surabaya dengan informan yaitu Kepala Sub Bagian keuangan dan Staff keuangan. *Good Government Governance* diukur menggunakan empat indikator yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Kepatuhan Hukum. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diukur menggunakan indikator dari *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* yaitu Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Penerapan SOP, Pemeriksaan Prosedur, Pemantauan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif statistik, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good government governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerapan prinsip-prinsip *good government governance* yang baik dan sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu mencapai kinerja keuangan pemerintah daerah yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan serta penyediaan pelayanan publik.

Kata Kunci: *good government governance*, sistem pengendalian internal pemerintah, kinerja pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Dalam suatu negara salah satu faktor terpenting untuk mendorong kemajuan adalah dengan adanya sistem pemerintahan yang baik dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya. Pada pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan wewenang lebih untuk pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, kewenangan yang dapat diterima salah satunya yaitu merancang kebijakan daerah sendiri, yang dimana untuk memberikan pelayanan yang optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maryanto, 2020). Demi mencapai penyelenggaraan pemerintah yang efektif maka pemerintah berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan memiliki kewibawaan atau disebut dengan *good government governance*. *Good government Governance* sering diartikan sebagai Pemerintahan yang baik yang mana ditandai oleh penyelenggaraan yang kuat dan bertanggung jawab, serta beroperasi secara efektif dan efisien.

Menurut Nurbaeti dan Nugraha (2020) pada seluruh prinsip *good governance* saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 4 prinsip utama yang dapat jadikan gambaran pada administrasi publik yang mempunyai ciri pemerintahan yang baik yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Kepatuhan hukum. Salah satu manfaat yang didapat dari adanya pelaksanaan *good government governance* yaitu terbentuknya tahapan pengambilan Keputusan yang baik dimana dapat meningkatkan efisiensi, pelayanan publik dan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian sebagai pelaku utama dari adanya pelaksanaan *good government governance* dituntut untuk menyampaikan tanggung jawab yang lebih transparan dan juga lebih akurat. Di dalam era reformasi, langkah tersebut menjadi hal yang penting untuk dilakukan dengan memperkuat peran para lembaga pengawas sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah.

Selain *good government governance*, sistem pengendalian internal juga turut menjadi bagian dari pemerintahan yang baik dan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam sistem pengendalian internal pemerintah, Sistem pengendalian internal merupakan tahapan yang menyatu dengan tindakan dan aktivitas yang telah dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengelolaan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Aisy dan Haryanto (2024) Sistem pengendalian internal membantu organisasi dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasional, memastikan pelaporan yang akurat serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan dapat menghasilkan output yang lebih optimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik terkait, seperti penelitian yang dilakukan oleh Doni Putra Utama (2020) yang memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Maimanah dan Nurdiono (2024) yang menunjukkan bahwa *Good Government Governance* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan Tami Nisita Rahmani (2023) menunjukkan dua hasil yang berbeda pada sistem pengendalian internal pemerintah memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pada *Good government governance* memperlihatkan bahwa *Good government governance* meskipun diterapkan dengan baik, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?, (2) Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah?. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* yang diperkenalkan oleh *Edward Freeman* (1984) menekankan bahwa keberhasilan suatu entitas tidak hanya bergantung pada pemegang saham, melainkan juga pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, seperti masyarakat, pemerintah, karyawan, organisasi non-pemerintah, hingga mitra kerja. Dalam ranah pemerintahan daerah, yang termasuk dalam kelompok *stakeholder* antara lain adalah warga sebagai penerima layanan, aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan, serta lembaga legislatif dan pengawas sebagai penjaga fungsi kontrol secara politik dan administratif.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Maimana dan Nurdiono (2024) menjelaskan bahwa kinerja merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tercantum dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) organisasi. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2008 Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Aisy dan Haryanto (2024) mengatakan bahwa warga negara mengkritisi prestasi pemerintahan lokal karena dianggap belum cukup baik. Oleh sebab itu, mereka berharap untuk meningkatkan performa dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai implementasi otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipi, merujuk pada hasil kerja yang diperoleh berdasarkan perencanaan kinerja baik pada level individu maupun organisasi. Proses ini mempertimbangkan pencapaian target, hasil yang diraih, dampak yang diberikan, serta perilaku kerja pegawai. Evaluasi atas kinerja tersebut dilakukan secara objektif, terukur, dapat dipertanggung jawabkan, melibatkan partisipasi berbagai pihak, dan transparan. Seluruh proses ini terintegrasi dalam Sistem Manajemen Kinerja yang mencakup tahap perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi, hingga tindak lanjut.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Pitaloka *et al.* (2020) Dalam PP No. 60 Tahun 2008 merupakan hasil adaptasi dari prinsip pengendalian internal yang telah direkomendasikan oleh *The Committee of Sponsoring Organization* (COSO) pada tahun 1992. Secara teoritis, pengendalian internal dapat didefinisikan oleh COSO sebagai berikut: Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel unit usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Menurut COSO (2013) pengendalian internal memiliki lima komponen yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Risiko, 3) Penerapan Standar Operasional Prosedur, 4) Pemeriksaan Prosedur, 5) Pemantauan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP melibatkan sejumlah aktivitas seperti audit, peninjauan, evaluasi, pemantauan, dan tindakan pengawasan lainnya untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien demi kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan pasal 2 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengemukakan tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Good Government Governance

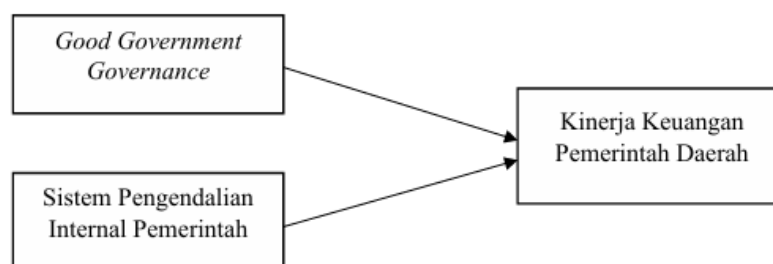
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 menyatakan *good government governance* atau pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good governance* secara konseptual mengartikan bahwa istilah baik dalam konteks ini memiliki dua makna. Pertama, mencakup nilai-nilai yang mendukung niat baik masyarakat, yang dapat berwujud dalam peningkatan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, menekankan pada aspek fungsional pemerintahan yang harus efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Dumbi *et al.*, 2022).

Pada dasarnya, penerapan tata pemerintahan yang baik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ideal tersebut, reformasi sistem birokrasi sangat diperlukan. Selama ini, birokrasi cenderung tidak memenuhi harapan dan sering kali tidak mampu menciptakan efisiensi serta efektivitas kerja, sehingga dianggap sebagai penghalang dalam mencapai tujuan pemerintahan (Widanti, 2022). Maka sebagai pelaku utama dari adanya pelaksanaan *good government governance* dituntut untuk menyampaikan tanggung jawab yang lebih transparan dan juga lebih akurat, langkah tersebut menjadi hal yang penting untuk dilakukan dengan memperkuat peran para lembaga pengawas sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah. *good governance* mempunyai prinsip antara lain: a) Partisipasi Masyarakat, b) Tegaknya Supremasi Hukum, c) Transparansi, d) Peduli pada dunia usaha, e) Berorientasi pada konsensus, f) Kesetaraan, g) Efektifitas dan Efisiensi, h) Akuntabilitas, i) Visi Strategis.

Prinsip-prinsip tersebut telah melekat pada sebuah pemerintahan dalam mencapai apa yang telah diharapkan sehingga hubungan baik dengan masyarakat dapat dirasakan (Engkus *et al.*, 2021). Menurut Saputro (2021) keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat, terikat, dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 unsur/prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik, yaitu: a) Akuntabilitas, b) Transparansi, c) Partisipasi, d) Kepatuhan hukum.

Rerangka Konseptual

Pada penelitian ini membahas terkait pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem pengendalian internal terhadap Kinerja Pemerintah daerah (Studi Pada Pemerintah daerah Kota Surabaya). Maka dalam penelitian ini dibuat rerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Good Government Governance (GGG) dalam konteks pemerintahan daerah dapat dipahami secara sederhana sebagai penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* ke dalam sistem dan manajemen pemerintahan daerah dengan cara yang tepat dan efisien. Konsep *Good Government Governance* tidak hanya sebatas pada pemahaman, tetapi juga harus diimplementasikan melalui tindakan nyata agar dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap pemerintah.

Menurut penelitian Maimanah dan Nurdiono (2024) yang mengemukakan bahwa *Good Government Governance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut :

H₁: *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mencakup berbagai kegiatan seperti audit, penilaian, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mendukung pimpinan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah.

Menurut penelitian Utama (2020) dan Rahmani (2023) yang mengemukakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Pada penelitian kuantitatif ini menggunakan statistik deskriptif untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Studi ini memberikan penjelasan tentang sebab akibat atau hubungan sebab akibat antara sistem pengendalian internal pemerintah dan prinsip-prinsip *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintahan Kota Surabaya. Suatu teori yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan gejala akan dapat dibangun dengan adanya penelitian ini. Menurut Maimanah dan Nurdiono (2024) Populasi dapat didefinisikan sebagai cakupan generalisasi yang dapat berupa item atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang ditemukan oleh peneliti dari banyak data yang akan digunakan untuk menguji populasi. Oleh karena itu, populasi yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari 15 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada di Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Lenaini (2021) *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel non-acak di mana peneliti memilih individu berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan pengambilan sampel pada masing-masing kepala sub bagian keuangan dan staff keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya sebanyak 60 responden.

Tabel 1
Organisasi Perangkat Daerah

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Responden
1.	Dinas Pendidikan	4
2.	Dinas Kesehatan	4
3.	Dinas Sosial	4
4.	Dinas Perhubungan	4
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4
7.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4
10.	Dinas Lingkungan Hidup	4
11.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	4
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4
13.	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga	4
14.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan	4
15.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	4
Jumlah Responden		60

Sumber: <https://organisasi.surabaya.go.id/homev1/npd>, 2024

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian yaitu berupa data kuesioner, adalah alat berisi serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner yang dibagikan berisi serangkaian pertanyaan mengenai *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan kinerja pemerintah daerah.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel penelitian merujuk pada atribut, nilai, atau karakteristik dari objek yang diteliti (baik individu maupun kegiatan) yang memiliki perbedaan antara satu objek dengan objek lainnya. Biasanya, variabel penelitian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis guna memperoleh informasi dari objek tertentu yang nantinya akan disimpulkan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen.

Variabel Independen

Good Government Governance

Good government Governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mana ditandai oleh penyelenggaraan yang kuat dan bertanggung jawab, serta beroperasi secara efektif dan efisien. Menurut Saputro (2021) terdapat 4 unsur/prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri ke pemerintahan yang baik, yaitu : a) Akuntabilitas, b) Transparansi, c) Partisipasi, d) Kepatuhan hukum.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut COSO (2013) pengendalian internal memiliki lima komponen yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Risiko, 3) Penerapan Standar Operasional Prosedur, 4) Pemeriksaan Prosedur, 5) Pemantauan.

Variabel dependen

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Kinerja aparatur pemerintah, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), merujuk pada hasil kerja yang diperoleh berdasarkan perencanaan kinerja

baik pada level individu maupun organisasi. Proses ini mempertimbangkan pencapaian target, hasil yang diraih, dampak yang diberikan, serta perilaku kerja pegawai. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Indikator pengukuran kinerja keuangan pemerintah ada 4 yaitu: 1) Kualitas Kerja, 2) Ketepatan Waktu, 3) Kuantitas, 4) Komunikasi.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif, yang juga dikenal sebagai statistik deduktif, merujuk pada statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data numerik. Menurut Son (2023) analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai karakteristik setiap variabel penelitian yang diamati, meliputi rata-rata (*mean*), nilai maksimum, modus, varians, standar deviasi, dan lainnya.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pernyataan dalam kuesioner yang diberikan kepada responden dapat dianggap sah. Penentuan pengukuran pada uji validitas yaitu: Jika r hitung $>$ r tabel, maka pertanyaan dikatakan valid dan sebaliknya Jika r hitung \leq r tabel, maka pertanyaan dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen penelitian dapat diandalkan. Instrumen yang memiliki reliabilitas tinggi adalah instrumen yang, ketika digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan hasil yang konsisten. Proses uji reliabilitas dilakukan dengan menguji item-item pernyataan yang telah lolos uji validitas, dan selanjutnya reliabilitasnya akan dihitung. Suatu konstruk variabel dianggap memiliki reliabilitas yang baik jika nilai *Cronbach's alpha*-nya lebih besar dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah untuk menentukan apakah setiap variabel dan regresi mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua metode. Metode pertama adalah menggunakan Normal Probability Plot atau pendekatan grafis, di mana sebaran data atau titik-titik yang berada di sekitar sumbu diagonal membentuk garis diagonal, sehingga model regresi yang dihasilkan memenuhi asumsi normalitas. Metode kedua adalah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Jika nilai KS yang diperoleh sama dengan atau lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dianggap normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap adanya multikolinearitas dalam persamaan regresi, yang dapat dilakukan dengan mengevaluasi nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika nilai VIF $>$ 10 dan nilai *Tolerance* $<$ 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala multikolinearitas, dan sebaliknya jika tidak memenuhi kondisi tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu metode untuk menguji model regresi guna mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini, gejala heteroskedastisitas dianalisis menggunakan grafik plot (scatterplot) dan uji Glejser. Prosedur yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan

heteroskedastisitas melibatkan pemeriksaan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Uji Glejser digunakan untuk mengukur residual absolut atau residual variabel independen, dengan kriteria nilai signifikansi $> 0,05$ atau tingkat kepercayaan lebih dari 5%. Jika grafik plot menunjukkan pola yang tidak jelas dan titik-titik tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi dapat dianggap bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh yang signifikan, baik secara terpisah maupun bersama-sama, antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R^2) adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen dimana semakin besar R^2 maka semakin tepat persamaan perkiraan regresi linear tersebut.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model bertujuan untuk menilai apakah model yang digunakan dalam penelitian, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah dan prinsip-prinsip *good government governance*, layak dijadikan prediktor terhadap fluktuasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, pengujian kelayakan model dilakukan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi α sebesar 5%. Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut: Jika nilai signifikansi uji F $< 0,05$, maka variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan prinsip-prinsip *good government governance* dianggap layak sebagai predictor dan sebaliknya.

Pengujian Hipotesis

Uji nilai t digunakan untuk menggambarkan sejauh mana setiap variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen secara terpisah dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Penerimaan ataupun penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Dengan demikian secara persial variabel independent tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika nilai $t \leq 0,05$ maka hipotesis dapat diterima. Dengan demikian secara persial variabel independent tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Karakteristik responden diuraikan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, masa kerja, dan usia. Sebagai berikut:

Tabel 2
Karakteristik Responden

		Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	20	33,3%
	Perempuan	40	66,7%
Pendidikan Terakhir	D3	2	3.3%
	S1	48	80.0%
	S2	3	5.0%
	SMU/SMA	7	11.7%

		Frekuensi	Presentase
Masa Kerja	< 3 Tahun	7	11.7%
	> 10 Tahun	24	40.0%
	2 - 5 Tahun	3	5.0%
	3 - 5 Tahun	7	11.7%
	6 - 10 Tahun	19	31.7%
Usia	25 - 30 Tahun	15	25.0%
	30 - 35 Tahun	11	18.3%
	35 - 40 Tahun	13	21.7%
	40 - 45 Tahun	12	20.0%
	> 45 Tahun	9	15.0%

Sumber data: Data Primer diolah, 2025

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan sebesar 66,7%. Pendidikan terakhir responden terbanyak adalah S1 sebesar 80%, masa kerja responden terbanyak yaitu > 10 Tahun sebesar 40%, Usia responden terbanyak yaitu 25-30 Tahun 25%.

Tanggapan Responden

Rata-rata tanggapan responden terkait *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3
Tanggapan Responden

Variabel	Frekuensi					Total skor	Rerata
	SS	S	CS	TS	STS		
<i>Good Government Governance</i>	117	115	9	1	0	242	4,45
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	154	135	11	0	0	300	4,48
Kinerja keuangan Pemerintah Daerah	82	150	8	0	0	240	4,31

Sumber data: Data Primer diolah, 2025

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa tanggapan responden terkait *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja keuangan Pemerintah Daerah menyatakan sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tanggapan responden berada dalam kategori interval kelas $4,20 < x \leq 5,00$.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

uji signifikansi dilakukan perbandingan antara Rhitung dan Rtabel dengan degree of freedom (df) = N-2, jadi 60-2= 58 pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka Rtabel dalam penelitian ini adalah 0,254. Dari uji validitas dengan menggunakan program spss diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel $\alpha=5\%$	Keterangan
<i>Good Government Governance</i>	GGG 1	0,758	0,254	Valid
	GGG 2	0,713	0,254	Valid
	GGG 3	0,649	0,254	Valid
	GGG 4	0,662	0,254	Valid

Variabel	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel $\alpha=5\%$	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	SPIP 1	0,540	0,254	Valid
	SPIP 2	0,765	0,254	Valid
	SPIP 3	0,564	0,254	Valid
	SPIP 4	0,740	0,254	Valid
	SPIP 5	0,710	0,254	Valid
Kinerja Pemerintah Daerah	KPD 1	0,837	0,254	Valid
	KPD 2	0,861	0,254	Valid
	KPD 3	0,702	0,254	Valid
	KPD 4	0,658	0,254	Valid

Sumber data: Data Primer diolah, 2025

Dari table diatas menunjukkan hasil uji validitas bahwa semua pertanyaan tentang variabel *Good Government Governance*, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah valid. Ini karena hitung lebih besar dari Rtabel yaitu 0,254.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana jawaban kuesioner menunjukkan konsistensi atau kesamaan pada waktu yang berbeda.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
<i>Good Government Governance</i>	0,639	0,60	Reliable
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,685	0,60	Reliable
Kinerja Pemerintah Daerah	0,759	0,60	Reliable

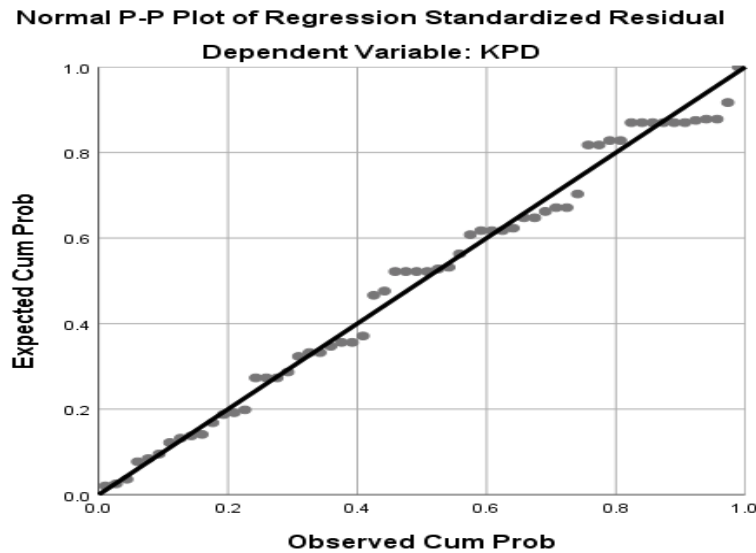
Sumber data: Data Primer diolah, Tahun 2025

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada Rtabel, sehingga instrumen tersebut dianggap reliabel karena nilai yang tercatat melebihi 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada Uji normalitas digunakan untuk menguji variabel dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pendekatan grafik dan Kolmogorov Smirnov.



Gambar 2
 Normal P-P Plot of regression standard
 Sumber data: Data Primer diolah, Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala hubungan linier antar variabel independen dengan menganalisis nilai VIF (*Variance Influence Factor*) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10 maka model bebas dari kasus multikolinearitas namun sebaliknya apabila nilai VIF > 10 dan nilai *Tolerance* < 0,10 maka terdapat indikasi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
 Hasil Uji Multikolinearitas

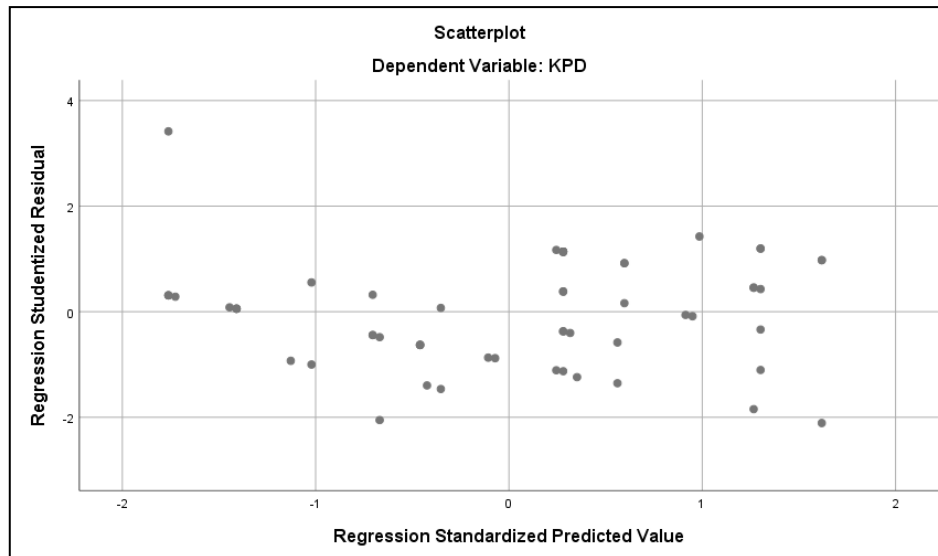
Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Good Government Governance	0,794	1,259	Bebas Multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0,794	1,259	Bebas Multikolinearitas

Sumber data: Data Primer diolah, Tahun 2025

Berdasarkan tabel 18 dapat dilihat nilai *tolerance* pada masing-masing variabel independent lebih besar dari 0,10 dan nilai pada *Varince Influence Factor* (VIF) kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari kasus multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah model regresi mengalami ketidakonstanan varians residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Berikut adalah hasil uji heteroskesdastisitas menggunakan scatterplot:



Gambar 3
Scatter Plot
Sumber data: Data Primer diolah, Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah terbebas dari kasus heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi juga dapat menggunakan uji statistik yaitu uji glejser yang dapat di lihat pada tabel berikut:

Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel *good government governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil dari uji regresi linier berganda adalah berikut:

Tabel 7
Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
		Beta				
1	(Constant)	4.701	2.362		1.990	.051
	GGG	.293	.122	.292	2.406	.019
	SPIP	.327	.104	.381	3.138	.003

a. Dependent Variable: KPD
Sumber data: Data Primer diolah, Tahun 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diatas persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$KPD = 4,701 + 0,293GGG + 0,327SPIP$$

Koefisien Determinasi (R Square)

Uji koefisien determinasi (R²) pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi (R²):

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.576 ^a	.332	.308	1.338

a. Predictors: (Constant), SPIP, GGG

b. Dependent Variable: KPD

Sumber data: Data Primer diolah, Tahun 2025

Berdasarkan memperlihatkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,332. Maka dapat disimpulkan bahwa 33,2% variabel Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel *Good government governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah. Sementara sisanya ($100\% - 33,2\% = 66,8\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan model atau Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari uji F:

Tabel 9
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50.697	2	25.348	14.160	.000 ^b
	Residual	102.037	57	1.790		
	Total	152.733	59			

a. Dependent Variable: KPD

b. Predictors: (Constant), SPIP, GGG

Sumber data: Data Primer diolah, Tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis tabel mengungkapkan nilai Fhitung sebesar 14,160 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi kriteria signifikansi secara statistik. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikansi secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini uji t mempunyai tujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antar variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 10
Hasil Uji Nilai t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	4.701	2.362		1.990	.051
	GGG	.293	.122	.292	2.406	.019
	SPIP	.327	.104	.381	3.138	.003

a. Dependent Variable: KPD

Sumber data: Data Primer diolah, Tahun 2025

Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukkan bahwa: 1) *Good Government Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, hal tersebut dapat di ukur

menggunakan taraf signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$ maka hipotesis pertama (H_1) diterima. 2) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut dapat diukur menggunakan taraf signifikansi $0,003 < 0,05$ maka hipotesis kedua (H_2) diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Good Government Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka hipotesis pertama (H_1) yang menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima. Terbukti bahwa *good government governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara sistematis, artinya *good government governance* mampu memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah secara terstruktur dan berkelanjutan.

Teori *stakeholder* memegang peranan penting dalam mendukung praktik *Good Government Governance* (GGG) melalui pengelolaan hubungan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan berbagai kelompok sebagai pemangku kepentingan utama, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif. Selain itu, teori *stakeholder* mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, misalnya melalui forum musyawarah atau perencanaan pembangunan, yang berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Teori ini juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah melalui penyediaan informasi yang terbuka, agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Di samping itu, pendekatan *stakeholder* memungkinkan pemerintah mengelola potensi konflik sosial secara lebih preventif, serta menciptakan stabilitas yang mendukung keberlangsungan kebijakan. Teori ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kapasitas, perbaikan kualitas hidup, dan penguatan ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, teori *stakeholder* menjadi kerangka teoritis yang relevan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ketika prinsip-prinsip *good government governance* diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi lebih selaras.

Hal ini selaras dengan penelitian Maimanah & Nurdiono (2024) dan Nurbaeti & Nurgraha (2020) yang menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. dengan demikian maka hipotesis kedua (H_2) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa semakin baik penerapan pengendalian internal pada pemerintahan maka dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori *stakeholder* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki keterkaitan erat dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Teori *stakeholder* menekankan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, baik dari internal organisasi seperti pegawai, maupun eksternal seperti masyarakat, lembaga legislatif, dan investor publik. Pendekatan ini bertujuan untuk

membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Sementara itu, SPIP merupakan suatu sistem yang dirancang guna memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi pemerintah dapat dicapai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengendalian dalam SPIP dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan hingga pegawai. Penerapan prinsip-prinsip dalam teori *stakeholder* mendorong pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, SPIP berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang menjamin proses pelaporan tersebut berjalan secara andal.

Hasil tersebut didukung dengan penelitian Mattoasi *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) *Good government Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik maka dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan baik dan sesuai tujuan organisasi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa variabel *good government governance* mempunyai peran dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan kontribusi berupa peningkatan efisiensi dan pengambilan Keputusan yang baik yang dapat meningkatkan pelayanan publik. (2) Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi kualitas kinerja yang akan dicapai oleh pemerintah daerah. sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik dapat dijadikan mekanisme pengawasan yang dapat membantu untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga dengan adanya evaluasi secara rutin dapat mengidentifikasi hal yang memerlukan perbaikan dan segera memberikan tindakan yang tepat.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yang dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan hanya berupa penyebaran kuesioner, sehingga dapat memungkinkan terdapat bias yang disebabkan dari pertanyaan yang cenderung mengarahkan responden pada jawaban tertentu atau responden mungkin memberikan jawaban yang mereka anggap lebih sesuai dengan norma sosial, yang dapat mempengaruhi akurasi dan objektivitas hasil penelitian. (2) Penelitian ini hanya berfokus pada analisis *good government governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah dalam hubungannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini belum melibatkan variabel lain, seperti kualitas sumber daya, kondisi ekonomi, serta kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi mempengaruhi dan menyempurnakan hasil penelitian.

Saran

(1) Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan sampel dengan meningkatkan jumlah sampel yang digunakan, sehingga hasil penelitian dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas. (2) Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambahkan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, R. N., & Haryanto. (2024). PENGARUH GOOD GOVERNANCE, PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada OPD Kota Semarang). *Jurnal Of Accounting*, 13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM, GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA.
- Dumbi, R., Arman, & Swastiani, D. (2022). *The Effect of Good Governance Implementation on Employee Performance at the Bulila District Office, Gorontalo Regency.*
- Engkus, Azan, R. A., Hanif, A., & Fitri, T. A. (2021). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Sosial*, 19.
- InfoPublik.id. (2024). *Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Pelayanan Publik Predikat Sangat Cettar 2024.* <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/885805/pemkot-surabaya-raih-penghargaan-pelayanan-publik-predikat-sangat-cettar-2024>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Maimanah, A., & Nurdiono, N. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 178–202. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2283>
- Maryanto. (2020). PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI. *Jurnal of Applied Accounting And Business*, 2.
- Nurbaeti, T., & Nugraha, D. S. (2020). *Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Garut).* www.jabarprov.go.id,
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 1 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/107573/pp-no-30-tahun-2019>
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SITEM PENGENDALIAN INTERNAL (2008).
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, 1999 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 1 (2000).
- Permatasari, I. A. (2020). KAJIAN PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK A STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE LEBAK REGENCY. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 33–48.
- Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A. salsu N., Mutohar, & Kabib, N. (2020). PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DALAM PERSPEKTIF “COSO” DI DESA KALIKURMO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG. *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora Penerapan*, 01.
- Rahmani, T. N. (2023). Pengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern serta Good Government Governance terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Bandung. *Journal Of Econmic, Finance and Soscial Science*, 1.

- Saputro, G. (2021). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEGAWAI KECAMATAN TAMBAKSARI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Son, M. J. E. (2023). PENGARUH KEPUASAN KERJA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah (2014).
- Utama, D. P. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 5(1), 101-106.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1)